

## ANALISIS PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL MADURA

Eni Sri Rahayuningsih  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Trunojoyo Madura  
Email : [enih4n4\\_utm@yahoo.com](mailto:enih4n4_utm@yahoo.com)

### Abstrak

Suku Madura di perantauan menyebar di seluruh wilayah Nusantara dan di berbagai Negara, dengan profesi yang sangat beragam. Tersebar nya penduduk Madura di berbagai penjuru nusantara dan dunia tidak terlepas dari jiwa perantau dan etos kerja orang Madura. Orang Madura selama ini dikenal religius (Islam), mempunyai jiwa perantau yang kuat, etos kerja keras, hemat, mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat. IPM di Madura relatif lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa berbagai faktor yang terkait dengan kondisi sumber daya ketenagakerjaan masyarakat Madura yang banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai sumber resmi antara lain BPS, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, BNP2TKI dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sejumlah masalah yang berimplikasi pada rendahnya kualitas tenaga kerja, antara lain: (1) mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal yang beresiko tinggi tanpa jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) rendahnya kesadaran pola hidup sehat; dan (3) rendahnya kesadaran pola makan yang sehat. Minat masyarakat Madura untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI sangat besar. Hal ini didorong oleh berbagai sebab terutama faktor ekonomi. Akan tetapi, rendahnya kualitas SDM masyarakat Madura menyebabkan berbagai permasalahan timbul. Permasalahan tersebut antara lain yang utama adalah maraknya praktek TKI Illegal. Secara kultural, permasalahan TKI dari Madura sifatnya khusus dan berbeda dengan 34 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga diperlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah setempat. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara (1) memfasilitasi peningkatan kualitas tenaga kerja Madura melalui fasilitas pelayanan diklat, pendampingan, konseling, advokasi, informasi lowongan kerja, pengurusan dokumen dan penyaluran tenaga kerja (*job fair*) dan lain-lain; (2) sosialisasi informasi tentang TKI, merubah pola pikir dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih menjadi TKI yang legal dan professional, serta sosialisasi dampak negative TKI illegal.

Kata Kunci : Madura, sumber daya manusia, tenaga kerja, kualitas

### PENDAHULUAN

Secara geografis, Pulau Madura terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Selat Madura di sebelah barat dan selatan menjadi pemisah antara pulau Madura dan Jawa. Saat ini Madura dan Jawa telah terhubung oleh Jembatan Suramadu. Dengan adanya Jembatan Suramadu diharapkan pembangunan di Madura menjadi lebih cepat untuk mengejar kemajuan pembangunan di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2015, jumlah penduduk di Madura pada tahun 2014 sebanyak 2.731.633 orang, dengan luas wilayah lebih dari 5300 km<sup>2</sup>. Dengan kondisi tersebut, kepadatan penduduk di Madura lebih rendah daripada di Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak potensi sumber daya alam di Madura yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Rendahnya curah hujan di Madura menyebabkan tanah di Madura kurang subur. Hal inilah yang membuat banyak orang Madura yang memilih pekerjaan sebagai nelayan, pedagang, atau bermigrasi. Bukan berarti sektor pertanian kemudian mati total, hanya saja tidak banyak dari orang Madura yang menggantungkan hidup di sektor tersebut (de Jonge, 1989). Umumnya mereka menanam lahan mereka dengan padi, palawija, ubi kayu, dan jagung (Rifai, 2007). Rendahnya kepadatan penduduk di Madura utamanya disebabkan oleh banyaknya penduduk Madura usia produktif yang merantau di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga komposisi penduduk di Madura didominasi oleh penduduk usia tidak produktif.

Suku Madura di perantauan menyebar di seluruh wilayah nusantara dan di berbagai Negara, dengan profesi yang sangat beragam. Diperkirakan seluruh penduduk yang merantau jumlahnya mencapai sekitar 20 juta jiwa (Ma'arif, 2015). Sehingga jumlah penduduk yang tinggal di Madura hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk Madura yang sebenarnya. Tersebar penduduk Madura di berbagai penjuru nusantara dan dunia tidak terlepas dari jiwa perantau dan etos kerja orang Madura. Orang Madura selama ini dikenal religius (Islam), mempunyai jiwa perantau yang kuat, etos kerja keras, hemat, mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat. Bahkan dalam hal berdagang, orang Madura adalah pesaing berat orang China. Dalam kehidupan sehari-hari, adakalanya orang Madura dan Orang China saling bekerjasama dalam berdagang, adakalanya saling bersaing.

Madura sebagai daerah muslim yang menganut sistem Patriarki, selama ini penduduk yang merantau lebih banyak laki-laki, sedangkan para wanita tinggal di rumah mengurus keluarga. Namun dalam perkembangannya saat ini semakin banyak jumlah wanita yang bekerja dan merantau. Bahkan saat ini jumlah TKI asal Madura didominasi (80%) oleh wanita. Meskipun demikian jumlah penduduk wanita masih tetap lebih banyak daripada laki-laki dengan *trend sex ratio* semakin meningkat mendekati angka 100. Artinya

jumlah penduduk laki-laki dan wanita semakin seimbang.

Rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Madura bekerja di sektor informal dengan resiko tinggi tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga banyak sekali kasus kecelakaan kerja pada usia produktif. Rendahnya pendidikan formal juga berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Masyarakat Madura masih terbiasa membuang sampah sembarangan di sungai, pantai, saluran air, jalan, pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sehingga yang tampak di mana-mana adalah saluran air yang tersumbat oleh sampah dan berbagai tempat yang penuh dengan tumpukan sampah. Dengan kondisi tersebut banyak sekali kasus kematian oleh penyakit yang disebabkan oleh lalat dan nyamuk. Kondisi tersebut diperparah oleh perilaku para penjual makanan yang menjajakan dagangannya tanpa penutup. Sehingga lalat dan debu dengan mudah menempel pada makanan tersebut.

Pesantren sangat populer bagi mayoritas masyarakat Madura. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan RI No 13 tahun 2014, pesantren menyediakan fasilitas pendidikan agama Islam yang bersumber dari Alquran, hadist dan berbagai sumber ilmu agama Islam lainnya. Jika semua jenjang pendidikan di Pesantren ditempuh mulai tingkat dasar hingga tingkat paling tinggi, maka membutuhkan waktu hingga lebih dari 15 tahun. Dengan pola pondok pesantren yang waktu belajarnya intensif siang dan malam tanpa libur, maka lama waktu tersebut setara dengan jenjang pendidikan formal sekolah dasar hingga pascasarjana. Sehingga kemampuan ilmu agama yang dimiliki oleh para lulusan pondok pesantren sangat tinggi hingga hafal Alquran dan hadist dengan sangat baik.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan RI No 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, maka kurikulum di pesantren selain mencakup ilmu agama Islam juga ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Sehingga

lulusan pondok pesantren dianggap setara dengan lulusan pendidikan formal yang terakreditasi oleh dirjen pendidikan.

Berdasarkan fakta dan data diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa berbagai faktor yang terkait dengan kondisi sumber daya ketenagakerjaan masyarakat Madura yang banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui hubungan berbagai faktor yang menjadi penentu kualitas tenaga kerja yang berasal dari Madura.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai sumber resmi antara lain BPS, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, BNP2TKI dan sebagainya. Data-data tersebut kemudian dianalisa untuk dapat menggambarkan kondisi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan masyarakat Madura. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga September 2017. Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :

1. Data Demografi (BPS)
2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Data Indeks Harapan Hidup (IHH) dan Angka Harapan Hidup (AHH)
4. Data Indeks Pendidikan atau Indeks Melek Huruf (IHM)
5. Data Jumlah Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren
6. Data Indeks Daya Beli (IDB)
7. Data Indeks Partisipasi Kasar (IPK)
8. Data Jumlah Tenaga Kerja
9. Data TKI Asal Madura

Data-data yang digunakan pada penelitian adalah data dari 10 tahun terakhir. Data runut waktu tersebut selanjutnya ditabulasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Selanjutnya dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada beberapa pihak terkait, penelitian ini mencoba melakukan analisa terhadap permasalahan utama yang dihadapi TKI asal Madura dan mencari solusi yang dianggap paling relevan.

## HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan data BPS Jawa Timur (2018) Penduduk yang tinggal di Pulau Madura hingga awal 2017 ini tercatat sebanyak 4.097.393 jiwa tersebar di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Dengan rincian di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.190.129 jiwa, Sampang 919.825 jiwa, Pamekasan sebanyak 869.636 jiwa, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.117.803 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 72 kecamatan, di 961 desa dan 29 kelurahan. Dibanding tahun 2016, jumlah penduduk di pulau yang memiliki luas 5.168 kilometer per segi ini meningkat. Sebab kala itu, data jumlah penduduk Madura hanya 3.995.143 jiwa.

### Indeks Pembangunan Manusia

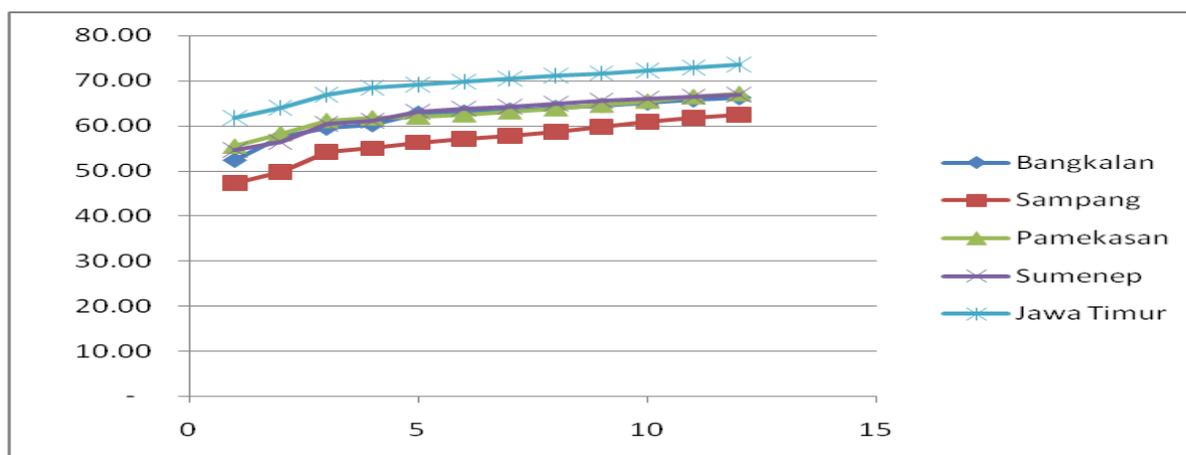
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : (1). Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2). Pengetahuan (*knowledge*); dan (3). Standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu penentu Dana Alokasi Umum (DAU). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Tabel 1. Perkembangan IPM Madura

Kabupaten	Tahun											
	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bangkalan	52.40	57.60	59.49	60.24	62.72	62.97	63.40	64.00	64.51	65.01	65.69	66.19
Sampang	47.30	49.70	54.16	54.98	56.27	56.99	57.66	58.68	59.70	60.78	61.67	62.39
Pamekasan	55.50	58.30	61.18	61.78	61.98	62.49	63.13	63.81	64.60	65.48	66.51	67.17
Sumenep	54.70	56.50	60.50	61.19	63.08	63.71	64.24	64.82	65.60	66.01	66.41	66.89
<b>Jawa Timur</b>	<b>61.80</b>	<b>64.10</b>	<b>66.85</b>	<b>68.42</b>	<b>69.18</b>	<b>69.78</b>	<b>70.38</b>	<b>71.06</b>	<b>71.62</b>	<b>72.18</b>	<b>72.83</b>	<b>73.54</b>

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015



Gambar 1. Perbandingan IPM Madura

Pada tahun 2010 UNDP sebenarnya sudah meluncurkan IPM yang dihitung dengan metode baru. Namun BPS belum secara langsung menerapkan metode baru tersebut. Setelah mengalami masa percobaan dan pengenalan selama 5 tahun (2010-2015), maka baru pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan IPM yang dihitung dengan metode baru. Selain merupakan kesepakatan global, metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan pembangunan manusia dengan lebih tepat. Transformasi ini ditandai dengan penerapan metode baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi masa kini.

Dua dari empat indikatornya diganti untuk merepresentasikan secara tepat hal-hal yang dihadapi saat ini. Dua indikator tersebut ialah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. HLS yang termasuk ke dalam dimensi pendidikan, menggantikan Angka Melek Huruf (IMH). Sementara PNB per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai indikator

tunggal dalam dimensi standar hidup (Martha, 2015). Perubahan indikator dari PDB ke PNB sangat menguntungkan IPM Madura karena juga menghitung pendapatan orang Madura yang bersumber dari *remittan* TKI di luar negeri.

Dua indikator lain masih tetap dipertahankan. Keduanya ialah Indeks Harapan Hidup saat lahir (IHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hanya saja ada sedikit penyesuaian pada HLS, yang terkait dengan penetapan batas usia penduduk yang diamati. Dalam metode baru, batas usia penduduk dinaikkan menjadi 25 tahun. IHH merupakan indikator yang mewakili dimensi kesehatan, sementara HLS termasuk ke dalam dimensi pendidikan. Jadi, secara umum, IPM tidak banyak berubah. Hanya ada sejumlah penyesuaian indikator pembentuknya. Dengan metode baru, secara umum hasil perhitungan IPM Indonesia saat ini menjadi lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan dengan metode lama. Misalnya saja, IPM Indonesia pada 2010 dan 2013, dengan

metode lama, sebesar 72,27 dan 73,81, dengan metode baru menjadi 66,53 dan 68,31. Di tingkat nasional, variasi perubahan indeks di tingkat nasional pada periode 2010-2013 tergolong kecil. Ditambah lagi dengan tren perkembangan indeks yang baru dengan lama masih sejalan, IPM baru mungkin tidak akan berdampak besar dalam eskalasi nasional.

Dampak besar justru berpotensi terjadi di daerah. Saat ini, IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam menghitung besaran Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dimasukkan ke dalam formula untuk menghitung kebutuhan fiskal daerah. Implikasinya, semakin tinggi IPM, semakin tinggi pula DAU yang diterima daerah. Peran DAU penting terutama di daerah-daerah yang kegiatan ekonominya secara dominan ditopang oleh belanja pemerintah.

Dalam konteks pembangunan daerah, DAU sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dengan IPM. Meski umumnya digunakan untuk keperluan belanja pegawai, DAU secara tidak langsung menjadi stimulus konsumsi di daerah. Selanjutnya, tingkat konsumsi ini turut berkontribusi bagi geliat kegiatan ekonomi daerah. Selama mengikuti prinsip-prinsip produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, serta pemberdayaan, kegiatan ekonomi daerah akan berujung pada pembangunan manusia yang lebih baik. IPM pun dapat terdongkrak naik. Implikasi berikutnya, DAU bisa semakin besar di masa mendatang.

Terkait dengan pembangunan di Madura, selama kurun waktu hampir 15 tahun terakhir (1999-2013), IPM di Madura relatif lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur. Rendahnya IPM Madura disebabkan oleh rendahnya komponen tingkat pendidikan yang diukur dari dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga. Bobot sepertiga sisanya diberikan pada indikator rata-rata lamanya sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal

yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Dari 4 kabupaten di Madura, IPM terendah selalu ditempati oleh Kabupaten Sampang. Namun secara umum trend IPM di Madura cenderung mengalami peningkatan. Adanya perubahan pola penghitungan IPM, diharapkan akan dapat mendongkrak IPM Madura karena potensi pendapatan masyarakat Madura yang merantau di dalam negeri dan luar negeri juga dihitung. Selain itu IPM di Madura juga dapat didongkrak melalui penyetaraan pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan formal. Penyetaraan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Madura menempuh pendidikan di pondok pesantren dengan waktu pendidikan yang lama. Bahkan tidak sedikit masyarakat Madura yang menempuh pendidikan di pesantren hingga lebih dari 10 tahun dengan keahlian ilmu agama yang setara dengan lulusan sarjana atau pascasarjana di perguruan tinggi.

### **Indeks Kesehatan**

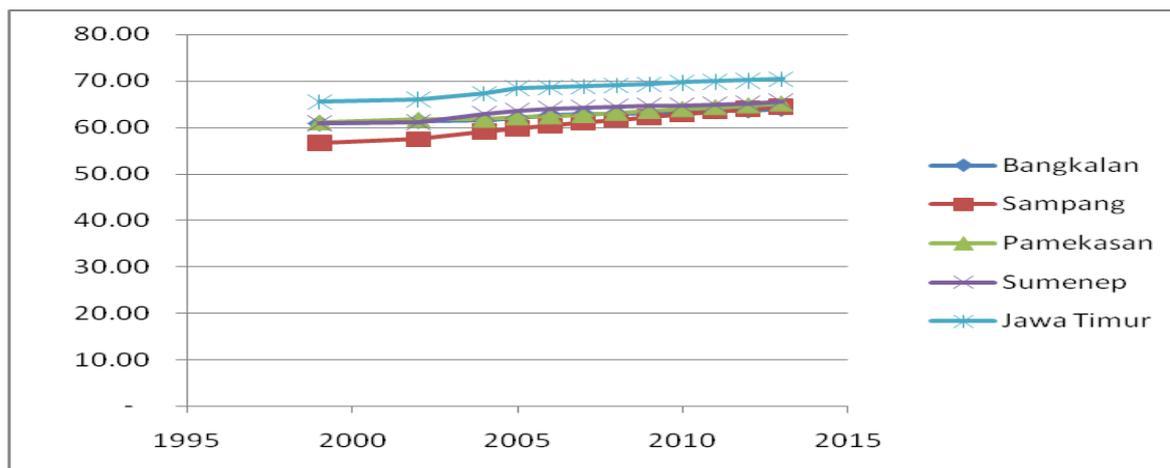
Indek Harapan Hidup (IHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Data IPM dengan metode lama menunjukkan bahwa selama kurun waktu hampir 15 tahun (1999-2013), IHH di Madura relatif lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur. Namun trend IHH di Madura cenderung mengalami peningkatan dan keseimbangan diantara keempat kabupaten.

Rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sejumlah masalah yang berimplikasi pada rendahnya IHH, antara lain: (1) mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal yang beresiko tinggi tanpa jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Tabel 2. Perkembangan IHH Madura

Kabupaten	Tahun											
	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bangkalan	60.90	61.40	61.60	62.00	62.70	62.90	63.01	63.16	63.32	63.48	63.65	64.02
Sampang	56.70	57.50	59.20	59.84	60.40	61.11	61.69	62.34	63.00	63.49	63.98	64.52
Pamekasan	61.10	61.70	61.70	62.20	62.40	62.70	63.19	63.59	63.99	64.39	64.79	65.19
Sumenep	60.90	61.20	62.90	63.43	64.00	64.23	64.35	64.53	64.71	64.89	65.07	65.49
<b>Jawa Timur</b>	<b>65.50</b>	<b>66.00</b>	<b>67.20</b>	<b>68.47</b>	<b>68.60</b>	<b>68.90</b>	<b>69.10</b>	<b>69.35</b>	<b>69.60</b>	<b>69.86</b>	<b>70.09</b>	<b>70.37</b>

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015



Gambar 2. Indeks Harapan Hidup (IHH) Madura

(2) rendahnya kesadaran pola hidup sehat; dan (3) rendahnya kesadaran pola makan yang sehat.

Rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Madura bekerja di sektor informal dengan resiko tinggi tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga banyak sekali kasus kecelakaan kerja pada usia produktif.

Rendahnya pendidikan formal juga berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Masyarakat Madura masih terbiasa membuang sampah sembarangan di sungai, pantai, saluran air, jalan, pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sehingga yang tampak di mana-mana adalah saluran air yang tersumbat oleh sampah dan berbagai tempat yang penuh dengan tumpukan sampah. Dengan kondisi tersebut banyak sekali kasus kematian oleh penyakit yang disebabkan oleh lalat dan nyamuk. Kondisi tersebut diperparah

oleh perilaku para penjual makanan yang menjajakan dagangannya tanpa penutup. Sehingga lalat dan debu dengan mudah menempel pada makanan tersebut.

Tingkat pendidikan yang kurang juga telah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Madura terhadap pola makan yang sehat. Setiap hari masyarakat sangat terbiasa menggunakan bahan plastik untuk menaruh atau membungkus makanan panas, memasak dengan menggunakan bumbu instan yang mengandung bahan pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Kondisi tersebut diperparah oleh budaya Madura yang cenderung menyukai rasa manis dan asin, serta cenderung lebih banyak makan daging dan ikan laut tanpa diimbangi konsumsi sayur dan buah. Bahkan dalam kondisi kelangkaan pasokan daging dengan harga yang sangat mahal sekalipun (Rp. 110.000 per kg), jumlah konsumsi daging tetap tidak berkurang. Hal tersebut berimplikasi pada maraknya penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya yang berakhir dengan kematian di

usia muda. Dengan alasan itu pula, hari raya kurban menjadi hari raya paling besar di Madura untuk pesta daging. Dalam rangka meningkatkan IHH di Madura, solusi yang paling efektif adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat.

### Indeks Pendidikan

Pendidikan adalah semua kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal, informal maupun non formal. Kegiatan pendidikan formal di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU/SMK. Sementara itu kegiatan pendidikan formal Islam di bawah Departemen Agama meliputi: MI, MTS, MA, Diniyah dan Pesantren. Sebagai suku yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan formal di Madura didominasi oleh pendidikan yang berbasis Agama Islam, yaitu: MI, MTS, MA, Diniyah dan Pesantren.

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan pergaulan anak-anak dan remaja yang cenderung ke arah negatif, peminat pendidikan berbasis agama Islam mengalami pergeseran tidak lagi terbatas pada kalangan masyarakat desa kelas ekonomi menengah ke bawah, melainkan sudah menjangkau semua lapisan masyarakat. Saat ini semua masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan agama bagi pembentukan akhlak generasi muda.

Indek pendidikan dengan metode yang baru menggunakan dua indikator yaitu: Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak adalah umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun

ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Data IPM dengan metode lama menunjukkan bahwa selama kurun waktu hampir 15 tahun (1999-2013), IMH di Madura relatif lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur. Dari 4 kabupaten di Madura, IMH terendah ditempati oleh Kabupaten Sampang. Secara umum trend IMH di Madura cenderung mengalami peningkatan.

Pesantren sangat populer bagi mayoritas masyarakat Madura. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan RI No 13 tahun 2014, pesantren menyediakan fasilitas pendidikan agama Islam yang bersumber dari Alquran, hadist dan berbagai sumber ilmu agama Islam lainnya. Jika semua jenjang pendidikan di Pesantren ditempuh mulai tingkat dasar hingga tingkat paling tinggi, maka membutuhkan waktu hingga lebih dari 15 tahun. Dengan pola pondok pesantren yang waktu belajarnya intensif siang dan malam tanpa libur, maka lama waktu tersebut setara dengan jenjang pendidikan formal sekolah dasar hingga pascasarjana. Sehingga kemampuan ilmu agama yang dimiliki oleh para lulusan pondok pesantren sangat tinggi hingga hafal Alquran dan hadist dengan sangat baik.

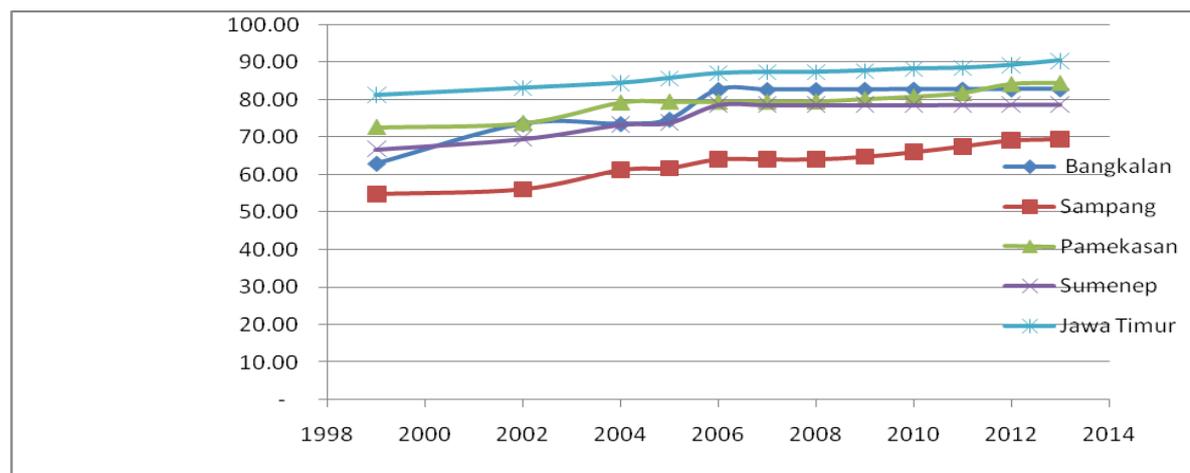
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan RI No 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, maka kurikulum di pesantren selain mencakup ilmu agama Islam juga ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Sehingga lulusan pondok pesantren dianggap setara dengan lulusan pendidikan formal yang terakreditasi oleh dirjen pendidikan.

Semua orang mengetahui bahwa Alquran dan hadist adalah sumber dari segala sumber ilmu. Dengan demikian seharusnya para santri lulusan pondok pesantren berpotensi lebih besar menjadi ilmuwan yang mampu mengajarkan dan mengamalkan isi Alquran dan hadist untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan berbagai teknologi baru yang bermanfaat untuk banyak orang.

Tabel 3. Perkembangan Indeks Melek Huruf Madura

Kabupaten	Tahun											
	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bangkalan	63.00	73.60	73.62	74.80	82.76	82.76	82.76	82.82	82.84	82.87	82.90	82.93
Sampang	54.90	56.20	61.27	61.80	64.12	64.12	64.12	64.81	66.03	67.56	69.12	69.47
Pamekasan	72.70	73.80	79.27	79.50	79.45	79.45	79.57	80.21	80.84	81.82	84.21	84.48
Sumenep	66.80	69.60	73.35	73.90	78.62	78.62	78.62	78.63	78.64	78.66	78.71	78.75
<b>Jawa Timur</b>	<b>81.30</b>	<b>83.20</b>	<b>84.54</b>	<b>85.80</b>	<b>87.10</b>	<b>87.42</b>	<b>87.43</b>	<b>87.80</b>	<b>88.34</b>	<b>88.52</b>	<b>89.28</b>	<b>90.49</b>

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015



Gambar 3. Indeks Melek Huruf (IMH) Madura

Dengan adanya sinergi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, maka semua isi Alquran dan hadist seharusnya tidak hanya dibaca saja, tetapi harus dipahami maknanya dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan pembentukan akhlak mulia, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penemuan teknologi baru. Jika hal tersebut dapat direalisasikan maka Pulau Madura akan berpotensi menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis agama Islam dan akan melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan yang luar biasa di berbagai bidang ilmu, sebagaimana tokoh-tokoh Islam dunia (lihat lampiran 1). Sebagai bukti keberhasilan pendidikan berbasis Islam di Madura, terdapat sejumlah tokoh-tokoh nasional asal Madura di berbagai bidang (lampiran 2).

Kuntowijoyo menyebut Madura sebagai “pulau seribu pesantren”, karena memang memiliki cukup banyak kyai, mulai kyai langgar, kyai pesantren, kyai tarekat

(mursyid), sampai “kyai” dukun. Bahkan sejumlah kyai besar di Pulau Jawa juga dilahirkan oleh kyai karismatik dari Kabupaten Bangkalan Madura bernama Syaikhona Kholil. Sejumlah kyai besar yang dilahirkan oleh Syaikhona Kholil, antara lain: (1) KH. Hasyim Asyari, pengasuh pesantren Tebuireng sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama; (2) KH. As’ad Syamsul Arifin Situbondo; (3) KH. Wahhab Hasbullah Tambak beras Jombang; (4) Abdul Karim (Mbah Manaf) Lirboyo Kediri; (5) KH. Ustman Djazuli Ploso Kediri; (6) KH. Maksum Lasem Jawa Tengah; (7) KH. Bisyr Mustofa Rembang; (8) KH. Munawwir Krpyak Jogjakarta.

### Indeks Daya Beli

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Mulai tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan IPM

yang dihitung dengan metode baru. PNB per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai indikator tunggal dalam dimensi standar hidup.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

PNB sendiri menggambarkan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara Indonesia (WNI). Lokasinya bisa di dalam maupun luar negeri. Sementara PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri. Pemiliknya bisa saja WNI ataupun warga asing.

Dengan teknologi yang semakin maju, arus pergerakan komoditas serta uang antar negara semakin terbuka dan mudah. Dunia kini seakan tidak terbatas lagi. Jarak fisik atau geografis tidak lagi menjadi penghalang sirkulasi ekonomi dunia. Misalnya saja, uang atau dana dari satu negara bisa berpindah ke negara lain dalam tempo singkat. Sistem keuangan dan perbankan dunia yang semakin saling terkoneksi membuat perpindahan itu menjadi nyata.

Dua indikator lain masih tetap dipertahankan. Keduanya ialah Indek Harapan Hidup saat lahir (IHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hanya saja ada sedikit penyesuaian pada HLS, yang terkait dengan penetapan batas usia penduduk yang diamati. Dalam metode baru, batas usia penduduk dinaikkan menjadi 25 tahun. Jadi, secara umum, wajah IPM tidak banyak berubah. Hanya ada sejumlah penyesuaian indikator pembentuknya.

Dengan metode baru, secara umum hasil perhitungan IPM Indonesia saat ini menjadi lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan dengan metode lama.

Misalnya saja, IPM Indonesia yang baru pada 2010 dan 2013 menjadi 66,53 dan 68,31. Sebelumnya, dengan metode lama, IPM Indonesia pada periode yang sama, tercatat sebesar 72,27 dan 73,81. Di tingkat nasional, variasi perubahan indeks di tingkat nasional pada periode 2010-2013 tergolong kecil. Ditambah lagi dengan tren perkembangan indeks yang baru dengan lama masih sejalan, IPM baru mungkin tidak akan berdampak besar dalam eskalasi nasional.

Dampak besar justru berpotensi terjadi di daerah. Saat ini, IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam menghitung besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Peran DAU penting terutama di daerah-daerah yang kegiatan ekonominya secara dominan ditopang oleh belanja pemerintah. Dalam konteks pembangunan daerah, DAU sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dengan IPM. Meski umumnya digunakan untuk keperluan belanja pegawai, DAU secara tidak langsung menjadi stimulus konsumsi di daerah. Selanjutnya, tingkat konsumsi ini turut berkontribusi bagi geliat kegiatan ekonomi daerah. IPM pun dapat terdongkrak naik dan DAU bisa semakin besar di masa mendatang. Bagi pembangunan ekonomi di Madura, metode penghitungan IPM yang baru justru menguntungkan untuk mendongkrak angka IPM. Adanya budaya pola hidup yang konsumtif, etos kerja keras, dan budaya merantau di dalam negeri dan luar negeri (TKI) merupakan potensi PNB dan daya beli yang besar untuk mendongkrak IPM.

### **Problematika TKI Asal Madura**

Besarnya faktor pendorong dan penarik berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah TKI asal Madura dari tahun ke tahun. Faktor pendorongnya antara lain: (1) budaya kerja keras; (2) budaya merantau; (3) budaya pernikahan dini yang berujung pada kesulitan ekonomi dan konflik rumah tangga; (4) kesempatan kerja di daerah asal yang terbatas; (5) budaya kekerabatan yang mendorong untuk menyusul kerabat yang sudah menjadi TKI sebelumnya; (6) motivasi yang tinggi sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh yang membutuhkan banyak biaya.

Tabel 4. Jumlah TKI Asal Madura

Kabupaten	2014	2015	2016
Bangkalan	5,495	5,615	4,542
Sampang	1,205	1,333	1,044
Pamekasan	1,784	1,852	1,553
Sumenep	565	736	620
<b>Total</b>	<b>9,049</b>	<b>9,536</b>	<b>7,759</b>

Sumber : BNP2TKI Jatim, 2017

Tabel 5. Jumlah *Remittance* TKI Asal Madura Tahun 2016

No	Kabupaten	Jumlah TKI (Orang)	<i>Remittance</i> (Rp)
1	Bangkalan	4,542	77,214,000,000
2	Sampang	1,044	17,748,000,000
3	Pamekasan	1,553	26,401,000,000
4	Sumenep	620	10,540,000,000
	Madura	7,759	131,903,000,000

Banyaknya jumlah TKI dari Madura berpotensi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Madura, khususnya dari aspek daya beli masyarakat melalui *remittance* yang dikirim TKI kepada keluarganya di daerah asal. Dengan asumsi rata-rata *remittance* per orang TKI sebesar USD 1.700 per tahun (BNP2TKI, 2015) dan kurs Rp. 10.000/USD maka *remittance* yang dikirim TKI kepada keluarganya di daerah Madura pada tahun 2016 disajikan pada Tabel 5.

Jumlah *remittance* tersebut akan jauh lebih besar jika : (1) jumlah TKI semakin meningkat; (2) gaji TKI meningkat; (3) kurs lebih besar dari Rp. 10.000 per USD; (4) rata-rata *remittance* per orang TKI lebih dari USD 1.700 per tahun. Dengan *remittance* tersebut maka daya beli masyarakat Madura (keluarga TKI) akan meningkat dan berdampak pada peningkatan perekonomian lokal secara umum. Selanjutnya peningkatan daya beli masyarakat Madura akan berpengaruh positif terhadap peningkatan indeks kesehatan dan pendidikan. Kondisi ideal tersebut akan terwujud jika semua TKI legal (berdokumen lengkap) dan mempunyai ketrampilan bahasa dan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerja.

Selama ini adanya berbagai kendala menyebabkan sebagian besar TKI asal Madura tidak mampu memenuhi

persyaratan administrasi yang berlaku. Sehingga sebagian besar TKI dari Madura berstatus ilegal karena tidak berdokumen atau bekerja tidak sesuai dengan kontrak, serta tidak mempunyai bekal ketrampilan bahasa dan kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Bahkan pemberangkatan dan penempatannya juga dilakukan secara ilegal oleh perorangan (tekong).

Data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah TKI asal Jawa Timur yang bermasalah berjumlah 7.493 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen berasal dari Madura, terutama dari Kabupaten Sampang.

Secara kultural, permasalahan TKI dari Madura sifatnya khusus dan berbeda dengan 34 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga diperlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah setempat (empat kabupaten di Madura dan Provinsi Madura). Permasalahan utama TKI asal Madura antara lain: tidak berdokumen, diberangkatkan dan ditempatkan secara ilegal oleh perorangan (tekong), pelanggaran kontrak kerja, perilaku negatif (curang dan tidak taat peraturan), usia terlalu muda atau terlalu tua, tingkat pendidikan rendah (tidak sekolah atau

hanya lulus sekolah dasar), kemampuan bahasa dan ketrampilan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. TKI ilegal (tidak berdokumen) di Negara tujuan mengalami masalah, antara lain:

- a) Tidak berhak mendapatkan fasilitas penempatan dan perlindungan dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan.
- c) Tidak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mendapatkan gaji jauh lebih rendah daripada yang seharusnya).
- d) Menjadi buronan petugas keamanan.
- e) Mendapat perlakuan yang tidak baik.

Dengan demikian, meskipun *remittan* TKI nampak menguntungkan, namun maraknya TKI terbukti menimbulkan banyak dampak negative, antara lain: konflik rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, pembunuhan (carok) karena perselingkuhan, kenakalan anak, peredaran dan narkoba, serta terlantarnya potensi sumber daya alam di daerah asal. Dengan demikian, meskipun *remittan* TKI nampak menguntungkan, namun maraknya TKI terbukti menimbulkan banyak dampak negative yang sangat merugikan. Terlebih sebagian besar TKI dari Madura (80%) berjenis kelamin wanita. Sehingga dampak negative terhadap rumah tangga menjadi semakin besar, khususnya untuk suami dan anak-anak yang ditinggalkan di daerah asal. Kondisi inilah yang saat ini sedang melanda Madura.

Banyaknya kasus TKI ilegal dan besarnya dampak negatif TKI di Madura menjadi desakan kuat bagi pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang tegas, antara lain: (1) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (2) membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Madura; (3) meningkatkan pelayanan dokumentasi TKI legal, dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah dan lebih murah; (4) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang resiko menjadi TKI ilegal; dan (5) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi TKI yang legal (berdokumentasi lengkap, mempunyai

bekal ketrampilan bahasa dan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerja).

Kuatnya faktor pendorong dan penarik menyebabkan jumlah TKI dari Madura meningkat dari tahun ke tahun. Namun sayangnya sebagian besar dari jumlah TKI tersebut adalah TKI ilegal yang sangat beresiko menimbulkan berbagai masalah yang merugikan TKI yang bersangkutan dan Negara. Hasil *Fokus Discussion Group* (FGD) dengan stakeholder TKI dan hasil survey lapangan menunjukkan bahwa sejumlah faktor pendorong dan penarik yang telah menyebabkan maraknya TKI ilegal asal Madura, antara lain:

- 1) Tekanan ekonomi rumah tangga yang disebabkan oleh pendidikan yang rendah atau budaya pernikahan dini yang memicu konflik rumah tangga. Sehingga mereka mengambil solusi instan dengan menjadi TKI ilegal yang prosesnya dianggap lebih cepat dan mudah.
- 2) Di Madura tidak ada PPTKIS. Sehingga peran PPTKIS seringkali digantikan oleh penyalur TKI ilegal (tekong). Para tekong seringkali mempengaruhi TKI untuk memilih jalur ilegal. Terdapat kecurangan sejumlah kecurangan yang dilakukan, antara lain: (1) paspor tidak sesuai, paspor kunjung digunakan untuk kerja, paspor palsu, dan paspor menggunakan identitas orang lain; (2) penempatan kerja tidak sesuai dengan dokumen kontrak kerja; dan (3) TKI berangkat tanpa bekal ketrampilan dan bahasa yang sesuai dengan tempat kerja.
- 3) Terdapat oknum PPTKIS yang curang, dengan sejumlah biaya oknum PPTKIS tersebut bersedia melayani TKI ilegal untuk diberangkatkan lebih cepat tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang berlaku.
- 4) Karakter orang Madura yang suka praktis (instan). Sehingga cenderung menghindari prosedur dan persyaratan yang dianggap sulit dan mahal.
- 5) Akses informasi terbatas, khususnya untuk masyarakat berpendidikan rendah yang tinggal di desa-desa terpencil.
- 6) Ajakan teman atau kerabat yang sebelumnya sudah menjadi TKI dan

mempengaruhi TKI untuk memilih jalur ilegal.

- 7) Pesaingan ekonomi di daerah asal yang mendorong TKI menempuh jalur ilegal yang instan.

### **Solusi Permasalahan TKI Asal Madura**

Norma ketenagakerjaan di Madura terdiri dari norma formal dan informal. Norma formal tentang ketenagakerjaan bersumber dari peraturan hukum mulai dari UUD RI tahun 1945, UU RI, Keppres, Peraturan Pemerintah (PP), Permenakertrans, Permenaker, dan Surat Edaran Menakertrans. Norma formal ketenagakerjaan di Indonesia setidaknya terdiri dari 48 peraturan. Stakeholder ketenagakerjaan Indonesia di dalam negeri menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- 1) Tenaga kerja
- 2) Pekerja/buruh
- 3) Pemberi kerja
- 4) Pengusaha
- 5) Perusahaan
- 6) Pelayanan penempatan tenaga kerja
- 7) Serikat pekerja/serikat buruh
- 8) Lembaga kerja sama bipartite (pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh)
- 9) Lembaga kerja sama tripartit (organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah).
- 10) Disnaker

Stakeholder ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri menurut UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari:

- 1) Pemerintah (Disnaker)
- 2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri
- 3) Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna
- 4) Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta,

dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI

Terkait masalah TKI ilegal, instansi pemerintah yang juga terkait adalah BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB), karena TKI wanita ilegal banyak yang disebabkan oleh tekanan ekonomi rumah tangga yang menikah usia dini. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran para tekong atau penyalur TKI ilegal. Namun tekong ini bekerja secara terorganisir dengan berbagai pihak di dalam negeri dan luar negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai daerah muslim, pedoman hidup orang Madura bersumber dari alquran, hadist dan budaya lokal Madura. Dengan pedoman hidup tersebut idealnya karakter tenaga kerja Madura adalah mempunyai perilaku baik. Namun dalam kenyataannya justru berbagai masalah yang melibatkan tenaga kerja Madura di dalam negeri maupun di luar negeri justru lebih banyak disebabkan oleh perilaku yang kurang baik. Dengan demikian, sebagai solusi masalah tersebut maka perlu peran stakeholder masyarakat di bidang keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah. Dengan kenyataan bahwa sebagian besar TKI asal Madura adalah wanita maka ormas yang berperan besar adalah ormas wanita seperti Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah, menyebutkan bahwa kualitas SDM masyarakat Madura secara umum berkualitas rendah. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan nilai IPM, IHH, IMH yang berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun, sejak awal tahun 2000 trend nilai indeks-indeks tersebut cenderung mengalami peningkatan.

Minat masyarakat Madura untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI sangat besar. Hal ini didorong oleh berbagai sebab terutama faktor ekonomi. Akan tetapi, rendahnya kualitas SDM masyarakat Madura menyebabkan berbagai permasalahan timbul. Permasalahan tersebut antara lain yang utama adalah maraknya praktek TKI Illegal.

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara (1) memfasilitasi peningkatan kualitas tenaga kerja Madura melalui fasilitas pelayanan diklat, pendampingan, konseling, advokasi, informasi lowongan kerja, pengurusan dokumen dan penyaluran tenaga kerja (*job fair*) dan lain-lain; (2) sosialisasi informasi tentang TKI, merubah pola pikir dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih menjadi TKI yang legal dan professional. Serta sosialisasi dampak negative TKI illegal.

#### DAFTAR PUSTAKA

..... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

..... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Biro Pusat Statistik (BPS). Jawa Timur Dalam Angka 2015. BPS Provinsi Jawa Timur. CV Media Knstruksi. Surabaya.

De Jonge, H. 1989. *Madura Dalam Empat*

*Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam.* (Suatu Studi Antropologi Ekonomi). (Terjemahan). Pt Gramedia, Jakarta.

De Jonge, H. 1989. *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi (Ed) Madura.* Rajawali Press. Jakarta.

Kuntowijoyo.. 2000. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura. 1850-1940.* Mata Bangsa. Jogjakarta.

Ma'arif, S. (2015). *The History of Madura. Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme sampai Kemerdekaan.* Araska. Jogakarta.

Martha, L.F. (2015) . Memaknai Indeks Pembangunan Manusia Yang Baru. Kompas. 9 September 2015

Rifai, M.A. 2007. *Manusia Madura. Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pedoman Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya.* Pilar Media. Bogor.

Zaeni, A. (2007). *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja),* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

